

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS DALAM MENDETEKSI PRAKTIK MANAJEMEN LABA

Kodriyah

kodriyah000@gmail.com

Neneng Sri Suprihatin

neneng.sri.beauty@gmail.com

Santi Octaviani

antie_pinky@yahoo.com

Universitas Serang Raya

Abstrak

Perkembangan system perbankan yang berbasis syariah banyak bermunculan disebabkan pemerintah yang memberi kebijakan *dual-banking system* dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Meskipun secara teoritis perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diharapkan dapat meminimalisir tindakan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris dalam mendeteksi praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah. Model penelitian dianalisis menggunakan *Multiple Linear Regression*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi data sekunder, dimana data dikumpulkan dan diolah dari berbagai sumber. Hasil akhir penelitian ini berdasarkan uji yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah tidak dapat meminimalisir manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, peranan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan peranan dewan komisaris mampu memprediksi praktik manajemen laba..

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Manajemen Laba.

Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan sektor yang diharapkan dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Perkembangan system perbankan yang berbasis syariah banyak bermunculan disebabkan pemerintah yang memberi kebijakan *dual-banking system* dalam Kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Meskipun secara teoritis perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, dalam praktiknya terdapat kemungkinan bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba Pramono, 2006 (dalam Sri Padmantlyo, 2010). Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah/*Investment Account Holder* (IAH) dan pemilik perusahaan. Salah satu kebijakan manajemen laba yang dilakukan adalah *smoothing of profit and lost sharing deposit returns* yaitu dengan cara memberikan insentif berupa *return* kepada IAH yang menyamai *market rate* sebagai *benchmark*-nya. Selain itu, kebijakan ini juga sering dilakukan dengan cara manajemen bank membentuk dana cadangan yang diambil dari porsi alokasi IAH dari periode akuntansi terdahulu. Sehingga, situasi ini akan berpotensi meningkatkan potensi *asymmetric information* bagi *stakeholder* perbankan syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan dalam pencatatan (laporan keuangan)

sebaiknya digunakan sistem basis akrual. Padahal selama ini prinsip dasar akrual sering digunakan untuk kepentingan manajemen laba (akrual ini disebut akrual kelolaan atau akrual diskresioner). Praktik manajemen laba terjadi di berbagai perusahaan, baik di sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Seperti diketahui bahwa adanya indikasi manajemen laba di perbankan syariah telah dibuktikan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain, Tulus (2014) menemukan bahwa adanya indikasi manajemen laba pada perbankan syariah, sedangkan Sri Padmantlyo (2010) menyatakan adanya manajemen laba pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat selama tahun 2002 sampai 2006. Manajemen laba juga dilakukan oleh bank syariah dengan cara menurunkan laba dalam laporan keuangannya (Astri dan Dewi, 2013)

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah Bab III Pasal 6 ayat 1 (b) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dan diperjelas dalam surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 10/SEOJK.03/2014 bahwa faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* berlaku bagi Perbankan Syariah diantaranya Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik maka tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan manajemen laba dapat diminimalisir (Diana, 2013). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Tulus 2014 perbedaannya adalah peneliti menambahkan variabel dewan komisaris sebagai variabel independen yang dijadikan salah satu faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tinjauan Pustaka

Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) dalam Hikmah (2013) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Keterkaitan *agency theory* dengan penelitian ini adalah karena manajemen laba merupakan salah satu bentuk *agency problem*. Manajemen laba terjadi karena adanya *assimetric information* antara manajer selaku agent dan pemilik perusahaan selaku principle. Dalam hal ini manajer mempunyai informasi tentang perusahaan secara lebih mendalam dibandingkan pemiliknya. Kesenjangan informasi ini sering mendorong perilaku *oportunistik (oportunistic behaviour)* dari manajer guna memaksimalkan keuntungan pada dirinya. Salah satu bentuk perilaku oportunistik ini dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan secara curang (Tulus, 2014).

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000 dalam Tulus 2014)

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk

dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2008 dalam Tulus 2014).

Manajemen laba dalam penelitian ini di deteksi dengan menggunakan model De Angelo dikembangkan pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan atau dapat dirumuskan:

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operation$$

Model De Angelo mengukur atau memproksikan manaejmen laba dengann *nondiscretionary accruals*, yang dihitung dengan menggunakan total akrual akhir periode yang diskala dengan total aktiva periode sebelumnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu badan independen yang bertugas melakukan evaluasi (*evaluating*), pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam, (Diana, 2013). Dalam penelitian ini DPS diukur dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.

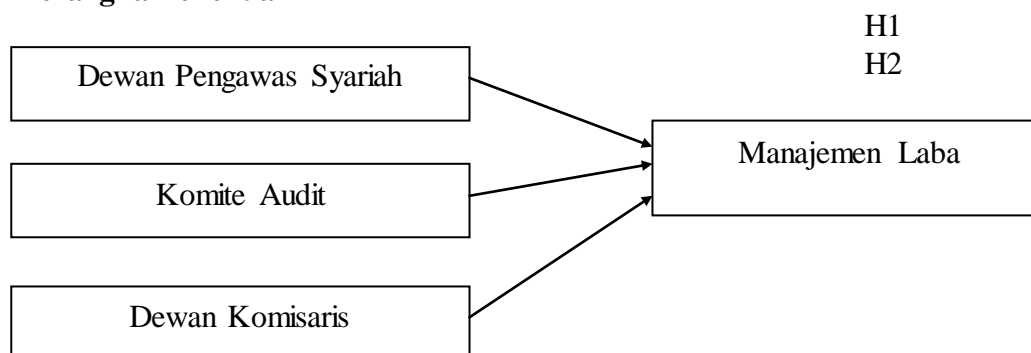
Komite Audit

Komite Audit atau *Audit Committee (AC)* adalah, Komite audit merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup *Good Corporate Governance*, tanggungjawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*froud*) (Diana,2013). Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan indikator jumlah komite audit yang ada diperusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris atau *Board of Commissioner (BOC)* adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur (Diana, 2013). Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2012), ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Kerangka Penelitian



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap manajemen laba

H2: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

H3: Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah: Bank Umum Syariah terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan keuangan selama periode 2013 sampai 2016 serta memiliki data yang lengkap.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Manajemen laba yang diukur dengan model De Angelo
2. Variabel bebasnya adalah Dewan Pengawas syariah yang diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah, Dewan komite audit yang diukur dengan jumlah dewan komite audit dan dewan komisaris yang diukur dengan jumlah dewan komisaris.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dimulai dari menguji asumsi klasik yang terdiri dari: Uji Normalitas; Uji Autokorelasi; Uji Heterokedastisitas dan Uji Multikoleniaritas. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan pengujian *Goodness of Fit Test* (uji koefisien determinasi), Uji signifikansi parameter individual (uji t). Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DPS} + \beta_2 \text{AC} + \beta_3 \text{BOC} + e$$

Keterangan :

Y = Manajemen Laba

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

DPS = Dewan Pengawas Syariah

AC = Komite Audit

BOC = Dewan Komisaris

e = error

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji asumsi klasik

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa semua model lolos dari multikoleniaritas, heterokedastisitas, autokorelasi sehingga model regresi layak untuk memprediksi model.

Analisis regresi berganda

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.112.044.210 - 69.826.992\text{DPS} - 82.032.201\text{AC} - 537.481.463\text{BOC}$$

Berdasarkan hasil tersebut nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 2.112.044.210 artinya bahwa tanpa adanya dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris bank umum syariah melakukan manajemen laba sebesar 2.112.044.210. Koefisien regresi variable DPS menunjukkan nilai -69.826.992 hal ini berarti setiap penurunan Dewan pengawas syariah sebesar 1% akan meningkatkan praktik manajemen laba senilai 69.826.992 dengan

asumsi viable lain tetap. Koefisien regresi variable AC menunjukkan nilai -82.032.201 hal ini berarti setiap penurunan komite audit sebesar 1% akan meningkatkan praktik manajemen laba senilai 82.032.201 dengan asumsi variable lain tetap. Koefisien regresi variable BOC menunjukkan nilai -537.481.463 hal ini berarti setiap penurunan dewan komisaris sebesar 1% akan meningkatkan praktik manajemen laba senilai 537.481.463 dengan asumsi variable lain tetap.

Hasil uji hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 nilai signifikansi dewan pengawas syariah menunjukkan nilai sebesar 0,878 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, jadi hipotesis satu ditolak. nilai signifikansi komite audit menunjukkan nilai sebesar 0,640 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, jadi hipotesis dua ditolak sedangkan nilai signifikansi dewan komisaris menunjukkan nilai sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba jadi hipotesis tiga diterima.

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai R^2 menunjukkan nilai 0,133 yang artinya bahwa manajemen laba dapat dijelaskan variable dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris sebesar 13,3% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 koefisien regresi dewan pengawas syariah menunjukkan arah negative hal ini berarti semakin banyak dewan pengawas syariah dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank umum syariah, dengan demikian keberadaan dewan pengawas syariah berperan sangat penting dalam hal mengevaluasi, mengarahkan dan mengawasi kegiatan pada bank umum syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sesuai yang ditetapkan oleh fatwa syariah namun dalam hal ini tidak signifikan pengaruhnya hal ini dibuktikan dengan nilai P Value sebesar 0,878. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulus, 2014 yang menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 koefisien regresi komite audit menunjukkan arah negative hal ini berarti semakin banyak komite audit dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank umum syariah, dengan demikian komite audit telah melakukan tugas audit internalnya demi kepercayaan pihak luar terhadap kinerja bank umum syariah namun perlu meningkatkan perannya lagi karena hasil dalam penelitian ini tidak signifikan pengaruhnya hal ini dapat terlihat dari nilai sig nya yaitu sebesar 0,640. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulus, 2014 yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 koefisien regresi dewan komisaris menunjukkan arah negative hal ini berarti semakin banyak dewan komisaris dapat menurunkan praktik manajemen laba pada bank umum syariah, dengan demikian dewan komisaris telah efektif dalam melaksanakan tugasnya. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tulus, 2014 yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Simpulan, Implikasi dan saran

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba dilakukan oleh manajemen namun dengan adanya peranan dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan komisaris dapat menurunkan tindakan oportunistik manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemilik modal untuk menyarankan kepada manajemen untuk lebih meningkatkan peranan dewan pengawas

syariah, komite audit dan dewan komisaris untuk mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba agar menambah kepercayaan pihak pengguna informasi terhadap kinerja bank umum syariah. Sesuai dengan hasil dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperpanjang periode penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat.
2. Peneliti selanjutnya menggunakan subjek penelitian yang berbeda selain perbankan syariah seperti perusahaan telekomunikasi atau pertambangan, untuk mengetahui adanya praktik manajemen laba pada berbagai jenis perusahaan
3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable lain untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba

Referensi

Faradila, Astri dan Ari Dewi Cahyati, Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah. JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 hal 57-74.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000

Hikmah, Is'ada Rahmawati, (2013), Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, *Accounting Analysis Journal*(AAI 2(1) 2013)

Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2012, Prinsip Dasar Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia

Maulidah, Diana. (2013). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap *Earnings Management* Dalam Perusahaan Perbankan Di Indonesia. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Padmantlyo, Sri. (2010). Analisis Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia). *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Volume 14, Nomor 2, Desember 2010, hlm. 53-65. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah

Suryanto, Tulus (2014), Manajemen Laba Pada Bank Syariah Di Indonesia: Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah. *KINERJA*, Volume 18, No.1, Th. 2014: Hal. 90-100

Tabel 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2113044210,111	1083416467,471		1,950	,059
	Dewan Pengawas Syariah	-69826992,726	453200164,647	-,026	-,154	,878
	Komite Audit	-82032201,913	174026475,329	-,072	-,471	,640
	Dewan Komisaris	-537481463,934	232839712,118	-,403	-2,308	,027

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Tabel 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,444 ^a	,197	,133	1233635785,38589